

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan pers dalam sejarah Indonesia tidak dapat dipungkiri telah memberikan kontribusi yang besar dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa dan menyebarkan nasionalisme Indonesia. Seperti yang dijelaskan Surjomihardjo (dalam Hutagalung, 2013, hlm. 55) bahwa “perkembangan pers di masa penjajahan sejak pertengahan abad ke-19 ternyata telah dapat menggugah cendekiawan Indonesia untuk menyerap budaya pers dan memanfaatkan media cetak sebagai sarana membangkitkan dan menggerakkan kesadaran bangsa.”

Selanjutnya Anderson (dalam Kaligis, 2011, hlm. 84) menjelaskan bahwa “nasionalisme memerlukan teknologi baru dan bentuk baru dari organisasi untuk memberikan pengaruhnya. Teknologi mesin cetak mendorong berkembangnya bahasa nasional sebagai sarana komunikasi antar anggota bangsa, sehingga komunitas yang besar itu saling mengenal satu sama lain sebagai satu bangsa.” Dengan kata lain pers berperan sebagai penyebar gagasan-gagasan kaum elite mengenai kesadaran berbangsa yang kemudian disebarluaskan kepada rakyat Indonesia secara lisan, mengingat masih minimnya angka melek aksara dikalangan masyarakat Indonesia saat itu.

Suwirta (2008, hlm. 48) menjelaskan bahwa “pers berfungsi untuk memberikan *news and views* (berita dan opini) kepada masyarakat dan pemerintah.” Dengan kata lain pers tidak hanya menyajikan berita saja, namun juga memberikan opini mengenai suatu peristiwa yang sedikit banyaknya dapat memengaruhi pandangan masyarakat. Oleh karena itu pers memiliki peran penting dalam pembentukan opini masyarakat sehingga melalui pers dapat dilihat bagaimana kondisi suatu negara pada suatu zaman.

Pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada pers khususnya media cetak yang berbentuk majalah kebudayaan. Alasan pertama yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengkaji mengenai salah satu majalah kebudayaan di Indonesia adalah karena mayoritas kajian mengenai pers khususnya dalam media cetak hanya terfokus pada surat kabar saja, padahal majalah khususnya majalah kebudayaan memiliki perjalanan sejarah yang menarik untuk dikaji, seperti peranan majalah kebudayaan sebagai wadah bagi para seniman untuk

Nurmalia Susanti, 2018

PERLAWANAN MAJALAH SASTRA TERHADAP POLITIK KEBUDAYAAN PEMERINTAH MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1961-1964): KASUS LEKRA VS MANIKEBU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menyampaikan argumennya dalam menentukan arah kebudayaan nasional Indonesia dan keterlibatan majalah kebudayaan dalam suatu kondisi politik yang sedang berlangsung.

Majalah kebudayaan yang akan dikaji bernama *Sastra*, diterbitkan oleh H. B. Jassin pada tahun 1961 sebagai salah satu wadah bagi sastrawan Indonesia untuk menuangkan karya-karyanya. Dalam keterangan majalah *Sastra* no. 1 Th. I (Jassin, dkk., 1961, Mei, hlm. 2) berbunyi “madjalah bulanan jang ingin memberikan sumbangan kepada perkembangan tjerita pendek Indonesia dan Mantjanegara”. Adapun susunan pengurus majalah ini diantaranya Bambang Munhari sebagai direksi, H. B. Jassin sebagai ketua redaksi, M. Balfas sebagai sekretaris redaksi, D. S. Moeljanto sebagai penyelenggara redaksi, sedangkan untuk bagian ilustrasi memiliki anggota yang cukup banyak yaitu Ekana Siswojo, Toha Mochtar, Tatang M, Zaini, dan A. Wakidjan. Serta bagian tata usaha dipegang oleh Dasimoen. Majalah ini dijual dengan harga eceran Rp. 8,50 untuk daerah Jawa dan Rp. 9 untuk daerah di luar Jawa, sedangkan untuk berlangganan selama 6 bulan dijual dengan harga Rp. 51 untuk daerah Jawa dan Rp. 54 untuk daerah di luar Jawa (Jassin, dkk., 1961, Mei, hlm. 2).

Penelitian ini memfokuskan pada kajian mengenai perlawanan majalah *Sastra* terhadap politik kebudayaan pemerintah tahun 1961-1964. Dengan memfokuskan pada masalah tersebut, penulis ingin menyampaikan bahwa penelitian sejarah tidak hanya bisa dilakukan pada pihak-pihak yang berkuasa di satu waktu dan tempat saja, tapi juga bisa dilakukan pada pihak-pihak “kecil”. Seperti halnya tokoh “aku, kamu dan dia” dalam buku *Prosa dari Praha* (Supriatna, 2018) yang menjelaskan mengenai perlawanan para tokoh tersebut sebagai korban dari hegemoni kapitalisme dan konsumerisme. Majalah *Sastra* juga merupakan media massa yang menjadi korban dari hegemoni pemerintah dalam bidang kebudayaan dan berusaha untuk melakukan perlawanan melalui upaya-upayanya dalam mempertahankan pendiriannya terkait kebudayaan nasional Indonesia.

Majalah *Sastra* tumbuh di tengah-tengah kondisi politik pada masa Demokrasi Terpimpin. Pada saat itu terdapat sebuah kecenderungan agar setiap seniman harus memiliki pandangan politik dan ikut serta dalam sebuah organisasi politik. Hal tersebut didukung dengan pendirian lembaga kebudayaan dalam tubuh partai-partai politik guna menarik massa dan mendukung pandangan politik partainya sehingga partai

Nurmalia Susanti, 2018

PERLAWANAN MAJALAH SASTRA TERHADAP POLITIK KEBUDAYAAN PEMERINTAH MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1961-1964): KASUS LEKRA VS MANIKEBU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tersebut memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Moeljanto & Ismail (1995, hlm. 9-10) menyebutkan beberapa lembaga kebudayaan yang dimiliki oleh partai politik yaitu “Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) milik Partai Nasional Indonesia (PNI), Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) milik Nahdlatul Ulama, Lembaga Seni Budaya Indonesia (Lesbi) milik Partai Indonesia (Partindo), dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) milik Partai Komunis Indonesia (PKI).”

Lembaga-lembaga kebudayaan tersebut yang berafiliasi dengan partai-partai politik juga memanfaatkan pers khususnya media cetak untuk mempublikasikan hasil karyanya, yang mana setiap partai memiliki media persnya sendiri untuk kepentingan partainya. Suwirta (2008, hlm. 50) menyebutkan beberapa media cetak tersebut diantaranya “surat kabar *Suluh Indonesia* milik PNI (Partai Nasional Indonesia), *Duta Masyarakat* milik NU (Nahdatul Ulama), *Harian Rakjat* dan *Warta Bhakti* milik PKI (Partai Komunis Indonesia).”

Sedangkan mayoritas seniman yang terkumpul dalam majalah *Sastra* adalah seniman yang tidak mau ikut campur dalam urusan politik, seperti yang dijelaskan Mohamad (1993, hlm. 22) bahwa “para penulis yang mengirimkan karya mereka ke sini umumnya penulis yang tidak – atau belum – tergabung dalam organisasi politik apapun. Bahkan diantara penulis *Sastra* itu, tampak ada tendensi keengganan memasuki partai yang ada saat itu.” Sehingga dalam perjalanannya seniman *Sastra* sering mendapatkan sindiran-sindiran dari seniman yang memiliki pandangan berbeda khususnya dari seniman Lekra seperti julukan “anti Manipol” yang sedikit banyaknya julukan dan sindiran tersebut menyebabkan seniman lain ikut serta dalam organisasi politik, seperti yang dijelaskan Mohamad (1993) bahwa

Sikap yang mengancam siapa saja yang dituduh “anti-Manipol” itu mungkin yang ikut mendorong banyak penulis dan seniman merasa aman terlindung dalam kekuatan politik yang ada. Terutama partai politik yang tergabung dalam “poros Nasakom” – front persatuan antara golongan “Nasionalis, Agama, dan Komunis” – yakni PNI (Partai Nasional Indonesia) dan NU (Nahdatul Ulama). Dalam lindungan partai-partai itu, seorang dengan mudah dapat pembela, dan juga, sering, mendapat posisi. (hlm. 22-23)

Nurmalia Susanti, 2018

PERLAWANAN MAJALAH SASTRA TERHADAP POLITIK KEBUDAYAAN PEMERINTAH MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1961-1964): KASUS LEKRA VS MANIKEBU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat adanya kesenjangan mengenai pandangan seniman *Sastra* dengan pandangan mayoritas seniman saat itu mengenai keterlibatannya dalam politik. Bahwa menurut seniman *Sastra*, seorang seniman tidak harus memasuki partai politik untuk mendukung jalannya revolusi yang belum selesai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seniman yang terkumpul dalam majalah *Sastra* merupakan seniman yang memiliki pandangan anti *mainstream* dalam melihat hubungan keseniman dan politik. Dan berusaha untuk mempertahankan pandangannya di tengah-tengah kondisi politik saat itu.

Selain itu, terdapat hal yang menarik lainnya terkait kajian mengenai majalah *Sastra* yaitu bahwa majalah *Sastra* mampu bertahan selama hampir empat tahun (1961-1964) pada masa Demokrasi Terpimpin, saat itu Sukarno sebagai presiden menerapkan ajaran Nasakom, yaitu ajaran yang memadukan tiga ideologi besar yang berkembang di Indonesia (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Winata dan Purwaningsih (2017, hlm. 732) menjelaskan bahwa “ideologi era itu (Demokrasi Terpimpin) yang lebih ditonjolkan bukanlah Pancasila melainkan Nasakom. Menurut Sukarno sendiri Nasakom merupakan perasan dari Pancasila sehingga jika Nasakom yang lebih diterapkan itu tidak menjadi masalah.”

Penerapan Nasakom membuat posisi PKI di Indonesia menjadi lebih kuat sehingga menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat karena banyak yang menganggap bahwa komunis adalah golongan orang yang tak beragama dan sangat membahayakan bagi integritas bangsa. Namun terlepas dari pandangan masyarakat yang berkembang saat itu, Sukarno tetap menjalankan Nasakom di Indonesia guna dijadikan sebagai penyeimbang kekuatan militer (nasionalis), Islam (agama), dan PKI (komunis) agar tidak melakukan kudeta kepadanya karena dengan penerapan Nasakom sebagai ideologi negara akan mengakibatkan ketiga golongan ini tidak bisa saling menyerang apalagi mengudeta presiden.

Ajaran Nasakom ini juga tercermin dalam Garis Besar Haluan Negara yang berasal dari Manipol-USDEK. Lebih lanjut Subkhan (2014) menjelaskan bahwa

Dokumen GBHN sendiri pertama kali ditetapkan oleh Presiden Sukarno melalui Perpres No. 1 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara. Dalam Pasal 1 Perpres tersebut dinyatakan bahwa “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, maka Manifesto Politik Republik Indonesia yang

Nurmalia Susanti, 2018

PERLAWANAN MAJALAH SASTRA TERHADAP POLITIK KEBUDAYAAN PEMERINTAH MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1961-1964): KASUS LEKRA VS MANIKEBU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1959 oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang adalah garis-garis besar daripada haluan negara”. Salah satu pertimbangan ditetapkannya GBHN ini adalah perlunya arah tujuan dan pedoman tertentu dan jelas untuk “melancarkan kelanjutan revolusi kita dalam keinsyafan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin”. (hlm. 135)

Dengan demikian, segala aspek kehidupan di Indonesia harus mengacu pada Manipol-USDEK. Untuk menunjang hal tersebut Sukarno sering membuat jargon-jargon politik, misalnya jargon “revolusi belum selesai”, “Nasakom”, “Manipol-USDEK”, dan lain sebagainya. Jargon-jargon tersebut dipopulerkan oleh media massa terutama media cetak guna memengaruhi pembentukan opini masyarakat, lebih lanjut Sholehuddin dan Kasdi (2015) menjelaskan mengenai peran jargon politik pada masa Demokrasi Terpimpin yaitu

Jargon politik yang dipopulerkan oleh media melalui percetakan pers merupakan jargon-jargon untuk mempropaganda massa yang digunakan sebagai pembentuk opini masyarakat pada bidang tertentu dan kepentingan pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Dalam Konteks Komunikasi Politik, maka media memiliki peran sebagai berikut : 1. Media melakukan fungsi edukasi politik, 2. Media memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan isu politik, dan 3. Media melakukan fungsi pemasaran politik dimana ketiga fungsi tersebut merupakan fungsi yang dapat menyebabkan propaganda politik secara besar-besaran demi mempengaruhi masyarakat pada tataran kognisi, afeksi, dan behavior. (hlm. 78)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pers khususnya media cetak dalam keterlibatannya dengan kegiatan politik tidak semata-mata mencerminkan perhatian media terhadap politik saja, melainkan menyiratkan pula adanya keterkaitan atas dasar satu kepentingan antara media massa dan kekuatan politik yang ada, sehingga dapat dikatakan bahwa pers dijadikan sebagai alat politik pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Taufik (1977, hlm. 72) mengenai fungsi pers pada masa Demokrasi Terpimpin yakni “sistim dan fungsi pers kita di waktu ini dapat dikatakan menganut konsep otoriter, yakni

Nurmalia Susanti, 2018

PERLAWANAN MAJALAH SASTRA TERHADAP POLITIK KEBUDAYAAN PEMERINTAH MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1961-1964): KASUS LEKRA VS MANIKEBU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sebagai terompet penguasa dan bertugas antara lain mengagungkan pribadi Presiden Sukarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi, dan mengindoktrinasikan Manipol.”

Aspek kebudayaan juga tidak terlepas dari kegiatan politik yang harus mendukung jalannya “revolusi yang belum selesai”. Pendekatan kebudayaan memang sangat efektif untuk mencapai tujuan-tujuan politik, karena dapat menarik perhatian sehingga dapat memengaruhi pandangan masyarakat Indonesia. Seperti pernyataan Presiden Sukarno yang dimuat dalam *Harian Rakjat* berjudul “Bung Karno dan Delegasi Seniman” (1957, 9 Maret) bahwa “... revolusi itu sendiri adalah kebudayaan, sebagaimana halnya juga politik. Beliau mengarapkan kepada kaum seniman, supaya mentjurahkan dajatnya untuk membentuk kepribadian manusia Indonesia.”

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diambil simpulan bahwa pemerintahan di bawah Sukarno menginginkan agar para seniman melalui karya-karyanya dapat berpartisipasi dalam jalannya revolusi yang belum selesai ini. Selanjutnya muncullah slogan “Politik sebagai panglima” untuk menggaungkan semangat mengisi jalannya revolusi yang belum selesai, slogan tersebut dipopulerkan oleh Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat). Dengan kata lain, para seniman termasuk sastrawan harus menempatkan politik sebagai acuannya dalam berkarya. Hal tersebut nyatanya tidak sejalan dengan pandangan H. B. Jassin, yaitu pemimpin redaksi majalah *Sastra*, beliau bisa dikatakan salah satu sastrawan yang tidak tertarik dengan politik dan termasuk ke dalam salah satu sastrawan penandatangan Manifes Kebudayaan. Mohamad (2016b, 16 Juni) dalam ceramahnya mengenai “sastra, politik, Lekra, dan Manifes Kebudayaan” menjelaskan bahwa

Dalam suatu bangunan politik selalu ada yang tersisa, selalu ada yang tidak dianggap sehingga timbul keretakan, di dalam keretakan ini akan timbul perlawanan (ada hegemoni, ada kontra hegemoni). Politik sebagai kekuatan baru yang terbentuk di tengah penindasan kekuasaan lama merupakan faktor positif yang menentukan perkembangan kebudayaan atau kesenian. Sehingga Manifes Kebudayaan sebenarnya tidak menentang politik, tapi yang ditentang adalah apabila politik itu menjadi komandan karena hal tersebut akan mengakibatkan gangguan pada kesenian yang mana kesenian menjadi dikontrol agar sesuai dengan yang diinginkan oleh penguasa.

Nurmalia Susanti, 2018

PERLAWANAN MAJALAH SASTRA TERHADAP POLITIK KEBUDAYAAN PEMERINTAH MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1961-1964): KASUS LEKRA VS MANIKEBU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diambil simpulan bahwa menurut seniman *Sastra* untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia tidak boleh mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain (Mohamad, 2016a, 16 Juni), karena setiap sektor adalah penting bagi kehidupan suatu negara. Dengan kata lain politik tidak boleh ditempatkan di atas kesenian, dan begitupun sebaliknya.

Apa yang sudah dijelaskan di atas menjadikan kajian mengenai majalah *Sastra* ini menarik. Karena majalah *Sastra* dapat dikatakan tidak mengikuti arah politik kebudayaan yang dijalankan pemerintah saat itu yang mana pemerintah menginginkan kebudayaan menjadi alat negara guna mendukung jalannya revolusi.

Adapun mengenai angka tahun yang akan dikaji adalah 1961-1964, peneliti mengambil patokan awal penelitian yaitu pada tahun 1961 karena majalah *Sastra* memulai penerbitannya pada tahun tersebut tepatnya pada bulan Mei 1961. Sedangkan angka tahun yang dijadikan patokan akhir penelitian ini yaitu pada tahun 1964 karena majalah *Sastra* diberhentikan penerbitannya ketika masa Demokrasi Terpimpin adalah pada tahun tersebut, tepatnya pada penerbitan No. 3 tahun 1964. Meskipun pada tahun 1967 majalah *Sastra* kembali terbit, namun peneliti tidak mengkaji lebih lanjut karena fokus penelitian yang akan dikaji adalah tentang perlawanan majalah *Sastra* terhadap politik kebudayaan pemerintah masa Demokrasi Terpimpin. Hal tersebut penting diteliti karena masih sedikit kajian mengenai majalah *Sastra*, padahal majalah *Sastra* memiliki perjalanan yang menarik untuk diteliti, seperti keterlibatannya dalam Manifes Kebudayaan. Oleh karena itu skripsi ini berjudul “Perlawanan Majalah *Sastra* terhadap Politik Kebudayaan Pemerintah Masa Demokrasi Terpimpin (1961-1964): Kasus Lekra vs Manikebu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memiliki permasalahan utama yang akan dikaji yaitu “Bagaimana perlawanan majalah *Sastra* terhadap politik kebudayaan pemerintah masa Demokrasi Terpimpin (1961-1964)?” yang kemudian penulis turunkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang terbitnya majalah *Sastra*?

Nurmalia Susanti, 2018

PERLAWANAN MAJALAH SASTRA TERHADAP POLITIK KEBUDAYAAN PEMERINTAH MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1961-1964): KASUS LEKRA VS MANIKEBU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Bagaimana konsep kebudayaan dari sudut pandang majalah *Sastra*?
3. Bagaimana upaya majalah *Sastra* dalam mempertahankan pandangannya mengenai konsep kebudayaan yang anti *mainstream*?
4. Bagaimana dampak yang diterima majalah *Sastra* akibat mempertahankan konsep kebudayaan yang anti *mainstream*?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersamaan dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan, tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perlawanan majalah *Sastra* terhadap politik kebudayaan pemerintah masa Demokrasi Terpimpin (1961-1964) yang kemudian penulis menurulkannya ke dalam beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan latar belakang terbitnya majalah *Sastra*.
2. Menganalisis konsep kebudayaan dari sudut pandang majalah *Sastra*.
3. Menganalisis upaya majalah *Sastra* dalam mempertahankan pandangannya mengenai konsep kebudayaan yang anti *mainstream*.
4. Menganalisis dampak yang diterima majalah *Sastra* akibat mempertahankan konsep kebudayaan yang anti *mainstream*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini secara khusus terutama untuk memperkaya penelitian dan penulisan sejarah khususnya dalam penulisan mengenai sejarah sastra Indonesia. Maka, disusunlah manfaat dari penulisan skripsi ini ialah :

1. Memperkaya tulisan mengenai sejarah sastra Indonesia di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan sejarah sastra Indonesia pada saat ini dan masa mendatang agar tetap terjaga.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan di persekolahan, dapat dijadikan bahan materi ajar mata pelajaran Sejarah pada kelas XII (Wajib) untuk

Nurmalia Susanti, 2018

PERLAWANAN MAJALAH SASTRA TERHADAP POLITIK KEBUDAYAAN PEMERINTAH MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1961-1964): KASUS LEKRA VS MANIKEBU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kompetensi Dasar 3.4 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia masa Demokrasi Terpimpin.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor 6449/UN40/HK/2017 tentang pedoman penulisan karya ilmiah UPI tahun akademik 2017, struktur organisasi penulisan skripsi terdiri dari : BAB I Pendahuluan, BAB II Kajian Pustaka, BAB III Metode Penelitian, BAB IV Pembahasan, serta BAB V Simpulan dan Rekomendasi.

BAB I Pendahuluan, dalam bagian pendahuluan dipaparkan mengenai latar belakang penelitian berdasarkan topik yang dipilih yaitu tentang “Perlawanan majalah *Sastra* terhadap politik kebudayaan pemerintah masa Demokrasi Terpimpin (1961-1964)”, dijelaskan secara rinci mengenai alasan penulis meneliti topik tersebut. Selain itu, latar belakang memberikan gambaran secara umum mengenai topik yang akan diteliti. Bab ini juga dilengkapi dengan rumusan masalah yang di dalamnya merupakan penjabaran dari topik permasalahan utama, rumusan masalah bertujuan untuk memfokuskan penulis merumuskan pembahasan dalam Bab IV. Selanjutnya, dalam bab ini dijelaskan mengenai tujuan penelitian yang akan dicapai, tujuan penelitian merupakan turunan dari rumusan masalah. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai manfaat penelitian yang diharapkan, baik manfaat untuk penelitian selanjutnya, maupun manfaat untuk dunia pendidikan agar dapat dijadikan referensi dalam proses belajar mengajar di persekolahan. Dan bagian terakhir dalam bab ini adalah struktur organisasi skripsi, berisi pemaparan singkat mengenai sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini dilengkapi dengan konsep-konsep dan teori yang relevan dengan topik yang dikaji, konsep dan teori tersebut berfungsi sebagai alat analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian dalam bab IV. Selain itu, akan dijelaskan pula tentang penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai sumber pendukung yang terdiri dari artikel dalam jurnal, skripsi, serta makalah dalam seminar. Selanjutnya penelitian terdahulu berfungsi untuk menegaskan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada sehingga karya tulis yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan.

Nurmalia Susanti, 2018

**PERLAWANAN MAJALAH SASTRA TERHADAP POLITIK KEBUDAYAAN
PEMERINTAH MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1961-1964): KASUS LEKRA VS
MANIKEBU**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini dijelaskan secara rinci mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Selanjutnya dalam metode penelitian sejarah dijelaskan pula bagaimana langkah-langkah melakukan penelitian terkait topik “Perlawanan majalah *Sastra* terhadap politik kebudayaan pemerintah masa Demokrasi Terpimpin (1961-1964)”.

BAB IV Pembahasan, bab ini berisi temuan dan pembahasan mengenai topik yang dikaji. Temuan dan pembahasan dirumuskan berdasarkan sumber-sumber yang digunakan oleh peneliti. Penjabaran dalam bagian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat dalam bab I. Topik kajian yang dipilih oleh peneliti adalah mengenai “Perlawanan majalah *Sastra* terhadap politik kebudayaan pemerintah masa Demokrasi Terpimpin (1961-1964)”, sehingga penulis memulai pembahasan dengan latar belakang diterbitkannya majalah *Sastra*. Selanjutnya tentang pandangan majalah *Sastra* mengenai konsep kebudayaan, upaya majalah *Sastra* dalam mempertahankan pandangannya mengenai konsep kebudayaan yang anti *mainstream*, dan diakhiri dengan dampak yang diterima majalah *Sastra* akibat mempertahankan pandangannya mengenai konsep kebudayaan yang anti *mainstream*.

BAB V Simpulan dan Rekomendasi, bab ini merupakan bab terakhir dalam karya ilmiah yang berisi simpulan dari pembahasan yang merujuk kepada permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu, bab ini dilengkapi dengan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dan rekomendasi untuk dijadikan referensi dalam materi pembelajaran di sekolah khususnya tingkat SMA dalam bagian ketika membahas materi masa Demokrasi Terpimpin.

Nurmalia Susanti, 2018

**PERLAWANAN MAJALAH SASTRA TERHADAP POLITIK KEBUDAYAAN
PEMERINTAH MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1961-1964): KASUS LEKRA VS
MANIKEBU**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

